

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik membentuk sejarah teologi Islam. Pemikiran keagamaan yang berkembang dinamika sosial dan di dunia Islam klasik seringkali dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan yang mengitari mereka. Teologi Asy'ariyah muncul dalam konteks ini bukan semata-mata sebagai hasil dari refleksi keagamaan itu juga muncul sebagai tanggapan terhadap perbedaan politik dan intelektual yang terjadi pada saat itu.¹

Abu al-Hasan al-Asy'arī hidup dari tahun 873 hingga 935 Masehi. Dia hidup di masa ketika umat Islam berada di tengah-tengah perselisihan antara dua garis besar pemikiran yaitu tradisionalisme tekstual kaum Hanbali dan rasionalisme ekstrem Mu'tazilah. Polarisasi ini tidak hanya teologis tetapi juga politis, karena kekuasaan yang berbeda sering mendukung kedua kelompok ini. Misalnya, kebijakan mihnah, atau inquisisi teologis, membuat Mu'tazilah menjadi mazhab resmi negara pada masa Khalifah al-Ma'mun.²

Situasi ini menimbulkan ketegangan dalam komunitas Muslim. Di satu sisi, rasionalisme Mu'tazilah dianggap mengancam otoritas teks wahyu dan membawa Islam terlalu jauh pada spekulasi filosofis. Di sisi lain, konservatisme kaum Hanbali

¹Huda Nurul, "Potret Dinamika Relasi Ushul Fikih Dengan Teologi Asy'ariyah Dalam Bingkai Taswib Al-Ghazali," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (1971): 93–106, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i2.916>.

²Supriadin, "Al-Asy'ariyah (Sejarah, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Doktrin-Doktrin Teologinya)," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 61–80, <https://doi.org/10.24252/.v9i2.1301>.

dianggap menutup ruang untuk ijtihad dan menghentikan kemajuan intelektual Islam. Karena ketegangan ini, terbentuk medan perselisihan ideologis. Inilah yang menyebabkan tanggapan Asy'ariyah sebagai jalan tengah.³

Fenomena politik kontemporer khususnya di Indonesia menunjukkan Perbedaan pilihan, kepentingan, dan identitas politik menjadi persoalan penting dalam masyarakat. Pemilu tahun 2024 menunjukkan polarisasi afektif dan identitas, termasuk menyebarkan cerita kebencian dan meningkatkan kesetiaan kelompok melalui faktor identitas. Dengan perkembangan media sosial sebagai platform komunikasi politik, fenomena tersebut semakin kompleks. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi, membangun opini publik, dan menyebarkan informasi.⁴

Al-Asy'arī berusaha membuat sistem teologi yang mampu memadukan rasionalitas dengan kesetiaan terhadap teks wahyu. Dia adalah seorang pengikut Mu'tazilah yang kemudian beralih. Ia menyadari bahwa perbedaan pendapat bukan satu-satunya sumber perpecahan masyarakat, polarisasi politik juga menyebabkan sikap eksklusif antar kelompok. Dengan demikian, teologi Asy'ariyah berasal dari upaya untuk mencapai perdamaian atau mediasi di tengah konflik.⁵

Dari perspektif epistemologis, Asy'ariyah mendasarkan struktur pengetahuan pada wahyu sebagai sumber utama. Akal menguatkan struktur ini sejauh batas

³Sulaeman Yogi, "Teologi Asy'ariyah: Sejarah dan Pemikirannya," *El-Adabi: Jurnal Studi Islam* 02, no. 01 (2023): 25–44, <https://doi.org/10.59166/el-adabi.v2i1.24>.

⁴Efrianti Yuwanda, "Polarisasi Politik Indonesia Tahun 2024 dalam Pemberitaan Media Online," *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 74–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v3i1.4869>.

⁵Rabbani Beril, "Perbandingan Konsep Ketuhanan Dalam Teologi Asy 'Ariyah dan Mu'tazilah: Kajian Rasionalitas dan Wahyu," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 16, no. 3 (2025): 101–10, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16511072>.

kewajaran. Posisi epistemologis ini, dalam konteks polarisasi politik, menyatakan bahwa prinsip-prinsip wahyu adalah referensi moral dan normatif dalam kehidupan publik, bukan kekuatan politik atau kelompok yang menentukan kebenaran. Oleh karena itu, sikap politik yang berlebihan, fanatisme kelompok, dan klaim kebenaran sepihak dianggap sebagai penyimpangan epistemik yang dapat menyebabkan konflik.⁶

Dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran (3):103, Allah SWT. Berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.

Ayat ini menekankan bahwa kesatuan umat hanya dapat terjadi jika semua orang menjadikan wahyu sebagai pedoman utama dalam kehidupan mereka sendiri.

⁶Indah Veranita Astrid, “E Pendidikan Islam : Analisis Konseptual Terhadap Integrasi Wahyu dan Akal Dalam Pembentukan Karakter Muslim,” *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 6, no. 2 (2025): 180–98, <http://dx.doi.org/10.30821/islamijah.v6i2.25600>.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/islamijah/article/view/25600>

Selain itu, ayat ini mengingatkan bahwa perpecahan sosial, politik, atau keagamaan dapat mengancam stabilitas komunitas dan dapat membawa umat kembali ke kondisi permusuhan seperti pada masa jahiliah, sehingga persatuan menjadi kewajiban moral, sosial, dan spiritual.⁷

Al-Ghazali melihat ayat ini sebagai kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga kesatuan umat melalui akidah yang lurus, syariat, dan akhlak sosial. Menurutnya, mencakup seluruh pedoman Ilahi yang menyatukan hati, dan perpecahan adalah hasil dari penyakit moral seperti fanatisme golongan, iri, dan kesombongan intelektual. Akibatnya, ayat ini menunjukkan bahwa persatuan umat adalah hasil dari penyucian hati dan komitmen pada nilai-nilai ilahiah, bukan hanya masalah politik.

Ayat ini menekankan betapa pentingnya persatuan dan larangan berpecah belah. Ini menunjukkan dalam konteks polarisasi politik bahwa konflik seperti yang terjadi dalam politik Islam (seperti antara kelompok Sunni dan Syiah atau antara konservatif dan liberal) bertentangan dengan perintah Allah. Teologi Asy'ariyah, yang mendorong wasathiyah (jalan tengah), dapat digunakan sebagai contoh untuk mencegah polarisasi dengan mengintegrasikan akal dalam memahami ayat ini. Ini

⁷Mukhtar. "Pentingnya Nilai Persatuan Perspektif Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 103 dalam Mengatasi Pandemi Covid-19," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 17, no. 2 (2021): 287–310, <https://doi.org/10.21009/JSQ.017.2.07>.
<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/20158>

akan membuat umat Islam berkonsentrasi pada persaudaraan daripada konflik politik.⁸

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

Artinya:

“Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir setelah (wafat)ku dengan saling memerangi satu sama lain”. (HR. Al-Bukhari no.121, dan Muslim no. 65).

Hadis ini menunjukkan bahwa konflik internal merupakan jenis kemunduran moral yang mengancam stabilitas masyarakat. Menurut teologi Asy'ariyah, yang menekankan keseimbangan, atau tawazun, antara kehendak Tuhan dan kewajiban manusia, perpecahan dianggap sebagai hasil dari kesalahan moral manusia. Hadis ini dapat digunakan sebagai bukti aqli bahwa polarisasi politik adalah penyimpangan dari prinsip rasional menjaga kemaslahatan jamaah. Al-Asy'ari dan para teolog Ash'ariyyah juga menekankan hal ini.⁹

Al-Ghazālī melihat hadis ini sebagai peringatan akhlak dan kritik terhadap penyakit moral yang menimbulkan perselisihan di antara orang-orang. Dalam kerangka etika sufistiknya, tindakan saling memerangi berasal dari amrāḍ al-qulūb seperti kesombongan, fanatisme golongan, cinta kekuasaan, dan kerakusan politik. Al-Ghazali menafsirkan kata "kufar" sebagai kembalinya manusia ke akhlak

⁸Anshori Afif dkk, “The Ideal Pattern of Social Integration Based on the Quran (Thematic Study of Verses on Social Integration),” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 8, no. 1959 (2024): 659–74, <https://doi.org/10.29240/alquds.v8i3.11330>.

<https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/index>

⁹Fata Khoirul Ahmad, “Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Tentang Persatuan Umat Islam,” *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, no. 2 (2014): 319–34, <https://dx.doi.org/10.30821/miqot.v38i2.65>.

<https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/65>

jahiliyah, yang ditandai dengan dominasi hawa nafsu atas hati. Menurutnya, konflik politik merupakan kegagalan penyucian jiwa, bukan hanya masalah eksternal. Menurut al-Ghazālī, hadis ini menunjukkan bahwa rusaknya batin yang tidak lagi tunduk pada nilai-nilai ilahiah adalah faktor utama yang menyebabkan kehancuran umat. Akibatnya, salah satu bagian dari tahdzīb an-nafs (penyempurnaan jiwa) dan tanggung jawab moral kolektif adalah menjaga persatuan umat.¹⁰

Fenomena polarisasi politik yang mendasari munculnya Asy'ariyah lebih dari sekadar perbedaan pendapat, itu adalah perebutan legitimasi antara agama dan kekuasaan. Teologi sering digunakan untuk membenarkan politik dalam sejarah Islam klasik. Gagasan pertanggungjawaban moral yang sejalan dengan otoritas rasional khalifah didukung oleh Mu'tazilah dengan doktrin kebebasan kehendak manusia.¹¹ Namun, para tradisionalis menegaskan kekuasaan Tuhan secara keseluruhan sebagai tanggapan terhadap dominasi rasionalisme politik.

Dalam konteks ini, Asy'ariyah menawarkan sintesis teologis yang menentang ekstremitas kedua pihak. Ia mengakui kekuatan Tuhan tetapi tidak menghilangkan peran manusia sebagai agen moral. Al-Asy'arī menciptakan prinsip kasb (perolehan), yang menunjukkan keseimbangan antara kebebasan dan determinisme. Pandangan ini memiliki konsekuensi politik yang signifikan karena menempatkan

¹⁰Sarwoto, "Pandangan Al-Ghazali tentang Pendidikan Moral," *Al Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2013): 322–23, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v6i1.58>.
<https://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/58>

¹¹Rido dkk, "Dinamika Pemikiran Teologis Al-Ma'mun: Analisis Kebijakan Politik dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Mazhab Mu'tazilah dan Asy' Ariyah," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 17, no. 2 (2025): 291–300, <https://doi.org/10.3783/tashdiq2i9.2461>.
<https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/tashdiq/article/view/780>

manusia sebagai objek moral di bawah otoritas Tuhan, tanpa menghilangkan kewajiban sosial mereka.¹²

Aspek politik humanis teosentris menjadi salah satu pola utama dalam pemikiran politik Islam Sunni yang menekankan pada kekuasaan wahyu, ketaatan kepada penguasa, serta pentingnya menjaga kestabilan sosial di kalangan umat Islam. Tradisi politik ini berakar dari pemikiran Ahmad ibn Hanbal, seorang tokoh terkemuka dalam bidang hadis dan pendiri mazhab Hanbali yang hidup pada era Dinasti Abbasiyah.

Pemikiran Hanbali muncul dalam konteks sosial dan politik yang sarat dengan konflik, terutama disebabkan oleh pergeseran antara kelompok rasionalis Mu'tazilah dan golongan ahli hadis yang berjuang demi menjaga kemurnian teks-teks agama. Dengan demikian, politik Hanbali sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk mempertahankan otoritas Al-Qur'an dan hadis dari kekuasaan rasionalisme teologis.

Salah satu aspek utama dalam politik Hanbali adalah ide ketaatan kepada pemerintah. Kaum Hanbali berpendapat bahwa keberadaan negara dan pemimpin politik adalah hal yang krusial untuk mempertahankan keteraturan sosial serta kesatuan umat Islam. Oleh karena itu, umat diwajibkan untuk mematuhi pemerintah selama pemimpin itu masih beragama Islam dan tidak secara jelas menginstruksikan perbuatan syirik. Bahkan ketika pemimpin dianggap sewenang-

¹²Manshur Munawwar Fadlil, "Doktrin Predestinasi dan Determinisme : Antara Muktazilah dan Asy'ariyah," *Tajdid: Journal Of Islamic Studies* 29, no. 2 (2022): 167–88, <https://doi.org/10.36667/tajdid.v29i2.501>.

wenang, masyarakat tetap dianjurkan untuk bersikap sabar dan menghindari pemberontakan bersenjata.

Pandangan ini muncul dari pengalaman sejarah awal Islam yang dipenuhi dengan perselisihan politik dan pertempuran antar saudara. Aliran Hanbali berpendapat bahwa pemberontakan melawan penguasa sering kali menyebabkan kerusakan sosial yang lebih besar dibandingkan dengan penindasan yang dilakukan oleh penguasa itu. Dengan demikian, mereka menganggap bahwa kestabilan politik lebih utama daripada perubahan politik yang drastis. Pandangan ini membuat sikap politik Hanbali menjadi cenderung konservatif dan menolak revolusi.¹³

Aspek politik rasionalisme ekstrem Mu'tazilah adalah salah satu bentuk yang signifikan dalam sejarah pemikiran politik Islam yang menjadikan akal sebagai alat utama dalam memahami agama, keadilan, dan kuasa. Mu'tazilah muncul pada abad kedua Hijriah di saat tradisi intelektual Islam sedang berkembang pada waktu Dinasti Abbasiyah. Aliran ini berkembang melalui para tokoh-tokoh Wasil ibn Ata dan Amr ibn Ubayd yang berusaha untuk menguraikan prinsip-prinsip Islam dengan cara yang rasional dan sistematis.¹⁴

Dalam konteks politik, pandangan rasionalis Mu'tazilah mengemukakan bahwa kekuasaan mesti berlandaskan keadilan. Penguasa tidak memiliki hak mutlak karena legitimasi politiknya tergantung pada kemampuannya untuk memerintah

¹³Nasution Harun, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 65–69.

¹⁴Ibid., 40–44

dengan adil dan sesuai dengan norma etika. Apabila penguasa bertindak sewenang-wenang, masyarakat berhak untuk mengkritik dan bahkan menolak kekuasaan tersebut. Dengan cara ini, Mu'tazilah menciptakan kesempatan bagi pengawasan sosial terhadap pemerintah dan menolak ide kekuasaan yang tidak dapat dikritik.¹⁵

Pemikiran politik kelompok Mu'tazilah sangat dipengaruhi oleh ajaran teologis mereka mengenai al-'adl, yang berarti keadilan Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah Yang Maha Adil, sehingga sangat tidak mungkin bagi-Nya untuk melakukan kebijakan yang zalim. Dari pemahaman ini muncul keyakinan bahwa manusia juga berkewajiban untuk menegakkan keadilan dalam aspek politik dan sosial. Penguasa yang melakukan tindakan zalim dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, karena kekuasaan seharusnya mencerminkan prinsip keadilan yang bersifat ilahi.¹⁶

Dalam politik, Asy'ariyah memandang bahwa entitas negara memegang peranan krusial dalam melindungi agama serta stabilitas sosial. Hubungan antara politik dan agama tak dapat dipisahkan, sebab kekuasaan dianggap sebagai alat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan melindungi kehidupan sosial. Namun, berbeda dengan pandangan tradisionalisme Hanbali yang cenderung bersikap pasif terhadap kekuasaan, serta berbeda dengan rasionalisme Mu'tazilah yang memberi terlalu banyak ruang bagi aktivitas politik, Asy'ariyah mengadopsi sebuah

¹⁵Fakhry Majid, *A History of Islamic Philosophy* (New York: Columbia University Press, 2004), hlm. 46–49.

¹⁶Nasution Harun, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 118–120.

pendekatan yang lebih proporsional dan moderat.¹⁷

Salah satu elemen penting dalam politik Asy'ariyah adalah harmoni antara wahyu dan rasio. Asy'ariyah menghargai peran rasio dalam menghayati agama dan aspek politik, tetapi rasio tidak boleh melebihi kekuatan wahyu. Menurut pandangan Asy'ariyah, wahyu tetap menjadi landasan utama dari legitimasi moral dan politik, sementara rasio digunakan untuk menganalisis dan memperjelas prinsip ajaran agama secara logis.¹⁸

Namun, Asy'ariyah tidak memberikan dukungan penuh kepada pemimpin seperti yang dilakukan oleh beberapa kalangan tradisional Hanbali. Pemimpin tetap harus memikul tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan, melindungi kesejahteraan rakyat, dan pelaksanaan amanah kekuasaan dengan sebaiknya. Dalam ajaran Asy'ariyah, kekuasaan bukan hanya hak politik, tapi juga membawa tanggung jawab yang bersifat etis dan religius. Oleh karena itu, pemimpin yang berbuat zalim masih dapat dikritik dan dinasihati selama ini dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerusuhan sosial yang lebih besar.¹⁹

Dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Andi Hermawan dkk yang berjudul *The Influence Of KH. Hasyim Asy'ari's Moderate Political Thought On Efforts To Counter The Radicalism Movement In Indonesia*. Menjelaskan bahwa

¹⁷Ibid., hlm. 80–84.

¹⁸Al-Ash'ari Abu Al- Hasan, *Al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah* (Hyderabad: Mathba'ah Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizamiyyah, 1929), hlm. 20–25.

¹⁹Al-Ghazali, *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 112–118.

radikalisme tidak hanya dipicu oleh agama, tetapi juga oleh faktor politik, sosial, ekonomi, dan pengaruh globalisasi. Gerakan radikal muncul saat agama dipahami dengan cara yang sempit dan kemudian digunakan untuk memaksakan perubahan sosial politik secara paksa.

Peneliti memberikan contoh kelompok seperti DI/TII, HTI, FPI, Majelis Mujahidin, dan kelompok teroris lain yang menolak sistem demokrasi dan ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam resmi. Penelitian menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam yang moderat, yang berlandaskan pada tradisi Aswaja-Asy'ariyah, dapat menjadi jawaban untuk polarisasi politik dan ekstremisme agama.²⁰

Teologi Asy'ariyah dapat dianggap sebagai contoh "politik teologis moderasi" yang berusaha untuk mencegah perselisihan ideologis dan memastikan stabilitas masyarakat. Ia membahas iman dan kufur serta hubungan antara manusia, kekuasaan, dan moralitas publik. Oleh karena itu, memahami model polarisasi politik yang ditemukan dalam teologi Asy'ariyah tidak hanya memeriksa sejarah, tetapi juga menemukan dasar dari cara Islam menangani konflik sosial politik.²¹

Ketegangan antara realitas kekuasaan dan idealisme teologis mencerminkan polarisasi politik Islam klasik. Pemikiran keagamaan pada masa Abbasiyah tidak

²⁰Hermawan Andi, "The Influence of KH . Hasyim Asy ' ari ' s Moderate Political Thought on Efforts to Counter the Radicalism Movement in Indonesia," *Jurnal Politik Walisongo* 6, no. 2 (2024): 165–77, <https://doi.org/10.21580/jpw.v6i2.20653>.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JPW/article/view/20653>

²¹Huda Khairul dkk, "Pemikiran Politik Islam dalam Moderasi Beragama," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2024): 2144–53, <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v4i5.3114>.

pernah berdiri netral terhadap kekuasaan, ia selalu bernegosiasi antara legitimasi dan penolakan. Dalam kasus ini, Asy'ariyah memainkan peran penting dalam membangun legitimasi moral untuk kekuasaan dan mengontrolnya dengan prinsip-prinsip etika teologis.²²

Asy'ariyah menolak pandangan bahwa akal manusia memiliki kekuatan absolut untuk menentukan kebenaran. Ia juga menolak pandangan fatalistik, yang menafikan kemampuan manusia untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan. Teologi Asy'ariyah memberikan dasar untuk politik etis yang mempertimbangkan kehendak manusia tetapi juga ketentuan ilahi.

Dimungkinkan untuk menganggap keseimbangan ini sebagai model polarisasi yang dikelola daripada ditolak. Melainkan menghapus perbedaan, Asy'ari berusaha menata dan mengarahkan polarisasi agar tidak destruktif. Sikap ini sejalan dengan prinsip moderasi (*wasathiyah*), yang menekankan pentingnya keadilan, toleransi, dan diskusi dalam konteks sosial politik.²³

Melalui pendekatan ini, Asy'ariyah menekankan bahwa perbedaan pemikiran dan kepentingan politik adalah keniscayaan sosial. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan tersebut diatur dalam konteks etika dan adab. Dengan demikian, model polarisasi politik dalam teologi Asy'ariyah dapat dianggap sebagai sistem manajemen konflik yang didasarkan pada nilai-nilai teologis.

²²Rambe toguan, "Pemikiran Politik Sunni Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.58836/jpma.v11i1.8630>.

²³Hermawan Andi dkk, "The Influence of KH . Hasyim Asy ' ari ' s Moderate Political Thought on Efforts to Counter the Radicalism Movement in Indonesia," *Jurnal Politik Walisongo* 6, no. 2 (2024): 165–77, <https://doi.org/10.21580/jpw.v6i2.20653>.

Di tengah perpecahan sosial politik yang semakin meningkat di dunia Islam, termasuk di Indonesia, relevansi Asy'ariyah dengan dunia modern menjadi semakin penting. Sangat penting untuk menghidupkan kembali moderasi teologis karena fenomena politik seperti identitas politik, perbedaan antara kelompok Islam konservatif dan progresif, dan penyalahgunaan simbol keagamaan dalam politik.²⁴

Tidak hanya perbedaan ideologi yang sering menyebabkan polarisasi dalam politik kontemporer, tetapi juga perebutan narasi tentang kebenaran dan moralitas publik. Debat teologis kembali menjadi sumber konflik ketika agama digunakan untuk legitimasi politik. Ini adalah tempat di mana nilai-nilai Asy'ariyah dapat dihidupkan kembali untuk memberikan kerangka berpikir yang menenangkan.²⁵

Oleh karena itu, penelitian yang membahas Bagaimana Model Jalan Tengah Politik Dalam Teologi Asy' Ariyah memiliki nilai ilmiah dan sosial yang signifikan. Ia tidak hanya berbicara tentang sejarah teologi, tetapi juga berbicara tentang nilai-nilai universal yang dapat digunakan sebagai referensi. Dengan demikian, penelitian ini akan menyelidiki masalah yang berkaitan dengan judul **“MODEL JALAN TENGAH POLITIK DALAM TEOLOGI ASY’ ARIYAH”**.

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang, persoalan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Model Jalan Tengah Politik Dalam Teologi Asy’

²⁴Subekti Restu Fiqi, “Komparasi Pemikiran Aqidah Al- Asy’arī dan Ibnu Taimiyah Serta Relevansinya dengan Moderasi Beragama di Indonesia,” *Journal of Mandalika Literature* 5, no. 4 (2024): 1020–30, <https://doi.org/10.36312/jml.v5i4.3584>.

²⁵Rahman Rini, “Pengembangan nilai moderasi beragama dalam materi akidah pada perkuliahan pendidikan agama Islam di Universitas Negeri Padang,” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 23, no. 2 (2023): 211–16, <https://doi.org/10.21831/hum.v23i2.65538>.

Ariyah?

Agar rumusan masalah menjadi lebih terarah dan spesifik, penelitian ini perlu memiliki batasan yang jelas. Oleh karena itu, beberapa batasan masalah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1.2.1 Bagaimana aspek-aspek politik dipahami dalam konteks teologi Asy'ariyah?

1.2.2 Bagaimana model jalan tengah politik dibangun menggunakan prinsip-prinsip teologi Asy'ariyah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki gagasan pokok yang disebut tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis aspek-aspek politik dipahami dalam konteks teologi Asy'ariyah

1.3.2 Untuk mengetahui model jalan tengah politik dapat dianalisis dan dijelaskan menggunakan prinsip-prinsip teologi Asy'ariyah

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.2.1 Secara teoritis

penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan penelitian tentang

Aqidah dan Filsafat Islam, terutama tentang bagaimana teologi Asy'ariyah berinteraksi dengan pemikiran politik. Selain itu, dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip Asy'ariyah yang berkaitan dengan keadilan, keseimbangan, kepemimpinan, ketaatan, stabilitas, kemaslahatan, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang model jalan tengah politik.

1.3.2.2 Secara Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini untuk membantu mahasiswa dan peneliti memahami pemikiran politik Islam klasik, khususnya tentang model jalan tengah politik dalam teologi Asy'ariyah. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi referensi akademik untuk memahami pentingnya sikap proporsional dalam menghadapi perbedaan teologis dan politik.

1.4 Penjelasan Judul

Adapun penjelasan judul sebagai berikut:

Model jalan tengah politik adalah sebuah ide dalam ranah politik yang menekankan pentingnya keseimbangan, moderasi, dan proporsionalitas dalam menjalankan kekuasaan serta interaksi sosial-politik. Dalam konteks pemikiran Islam, model jalan tengah dikenal sebagai pendekatan yang berupaya menjauhi pandangan ekstrem, baik yang bersifat konservatif maupun yang terlalu rasionalis. Prinsip ini muncul dari pemikiran bahwa kehidupan politik seharusnya tidak

dibangun di atas dasar fanatisme, kekerasan, atau kebebasan tanpa batas, tetapi harus diarahkan menuju pada kemaslahatan, keadilan, stabilitas sosial, dan persatuan di dalam masyarakat.²⁶

Dalam ajaran Islam, gagasan keseimbangan berasal dari prinsip ummatan wasathan yang ada dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menggambarkan komunitas Muslim sebagai komunitas tengah, yaitu kelompok yang menerapkan keadilan, keseimbangan, serta tidak bersikap berlebihan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal politik. Dengan demikian, konsep politik jalan tengah merujuk pada pendekatan politik yang menjauhkan diri dari radikalisme, otoritarianisme, dan juga liberalisme yang berlebihan dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan.²⁷

Sebutan Asy'ariyah itu sendiri merujuk kepada pendiri madzhab ini, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Nama lengkap Al-Asy'ari adalah Abu Al-Hasan 'Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin 'Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari dilahirkan di Basrah pada tahun 260 H/875 M. Setelah mencapai usia lebih dari 40 tahun, beliau berpindah ke Baghdad dan meninggal dunia di kota tersebut pada tahun 324 H/935.

Secara historis, pemikiran teologi Asy'ariyah muncul dari ide-ide Abu al-Hasan al-Asy'ari sebagai suatu tanggapan terhadap konflik antara kelompok

²⁶Najib Ainun Muhammad, "Islam Wasatiyah dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam di Indonesia," *Jurnal Theologia* 31, no. 1 (2020): 115–38, <https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.5764>.

²⁷Azami Trendi Hadiana dkk, "Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah 142-143 Perspektif Tafsir Maqashidi," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 2 (2022): 202–17, <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1498>.

rasionalis seperti Mu'tazilah dan kelompok tekstualis tradisional seperti Hanabilah. Dalam konteks politik, konflik ini juga menghasilkan dua aliran pemikiran yang bertentangan. Kelompok tekstualis cenderung menekankan ketaatan penuh kepada penguasa untuk menjaga kestabilan, sedangkan kelompok rasionalis lebih memberi penekanan pada keadilan dan kebebasan berpikir dalam menimbang legitimasi kekuasaan.²⁸

Dari uraian itu, judul ini pada dasarnya bertujuan untuk meneliti bagaimana pemikiran teologi Asy'ariyah memberikan pandangan model jalan tengah politik yang dapat berfungsi sebagai jembatan antara konservatisme berbasis teks dan rasionalisme yang ekstrem.

1.5 Tinjauan Pustaka

Jurnal ditulis oleh Budi kurniawan berjudul "*Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi*". Fokus penelitian ini adalah memeriksa politisasi agama sebagai gejala politik pasca-kebenaran di Indonesia. Masalah utamanya adalah banyaknya isu SARA, hoaks, dan fakta parsial yang dimanipulasi, yang menimbulkan polarisasi dan mengancam integritas demokrasi. Solusinya adalah meningkatkan daya kritis publik, literasi informasi, dan edukasi politik untuk mencegah manipulasi isu sensitif.²⁹

²⁸Istifarin Annisa Nur dkk, "Teologi Sunni : Perbedaan Teologi Asy ' Ari dan Maturidi," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 2, no. June (2023): 102–27, <https://doi.org/10.15642/jitp.2023.2.1>.

²⁹Kurniawan Budi, "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 133–54, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>.

Jurnal ditulis oleh Idris Thaha berjudul “*Azyumardi Azra's Middle-Path Islamic Politics: Anti-Violence and Democratization of Indonesia*”. Studi ini bertujuan untuk mempelajari pemikiran politik Islam jalan tengah Azyumardi Azra tentang cara membuat politik yang moderat, antikekerasan, dan mendukung demokratisasi. Munculnya konflik, kekerasan, fanatisme sektarian, polarisasi politik, dan absolutisasi pandangan politik adalah masalah yang mengganggu keseimbangan sosial. Solusinya adalah Islah atau rekonsiliasi, toleransi, penerimaan hasil demokrasi, dan penguatan pengaturan dan oposisi yang setia.³⁰

Jurnal ditulis oleh M. Ikhbar Fiamrillah Zifamina Berjudul “*Teologi Sosial-Kebangsaan KH. Hasyim Asy'ari (Analisis Kritis Resolusi Jihad dan Muqaddimah Qanun Assasi)*”. Studi ini meneliti konsep teologi sosial-kebangsaan yang ditemukan dalam karya KH. Hasyim Asy'ari, terutama Resolusi Jihad dan Muqaddimah Qanun Asasi. Masalah utamanya adalah pemisahan ilmu kalam dari masalah sosial-politik, penurunan kepercayaan agama, politik, dan sosial, ancaman kolonialisme, dan munculnya paham-paham yang menimbulkan konflik sosial. Rekontekstualisasi teologi Islam berdasarkan tauhid dan tradisi ulama lokal adalah solusi.³¹

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/121-07>

³⁰Thaha Idris dkk, “Azyumardi Azra’s Middle-Path Islamic Politics: Anti-Violence and Democratization of Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 5, no. 1 (2024): 71–82, <https://doi.org/10.15408/jisi.v5i1.39938>.

³¹Zifamina Fiamrillah M Ikhbar, “Teologi Sosial-Kebangsaan KH . Hasyim Asy ’ ari (Analisis Kritis Resolusi Jihad dan Muqaddimah Qanun Assasi),” *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 7, no. 1 (2025): 21–42, <https://doi.org/10.24042/ijitp.v7i1.26700>.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijitp/article/view/26700>

Jurnal ditulis oleh Miftahul Husna Siregar, Muhammad Arif Nasution dan Warjio Berjudul “Politisasi Agama pada Kampanye Pemenangan Eramas dalam Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018”. Fokus penelitian ini adalah bagaimana tim Eramas melakukan politisasi agama selama Pilkada Sumut 2018. Maraknya eksploitasi sentimen keagamaan dan narasi eksklusif, yang berisiko memecah belah masyarakat. Sebagian orang percaya bahwa penggunaan besar-besaran simbol dan gerakan keagamaan dapat menimbulkan ketegangan sosial dan memanipulasi pemilih. Memperkuat literasi politik warga dan memperketat pengawasan terhadap kampanye berbasis identitas politik adalah solusi yang ditawarkan.³²

Jurnal ditulis oleh Ozi Setiadi berjudul “Peta Pemikiran Politik Islam: Liberal, Moderat, dan Fundamental”. Penelitian ini berfokus pada tiga jenis pemikiran politik Islam yaitu liberal, moderat, dan fundamental. Ada masalah mendasar dan kelemahan internal, liberal memprioritaskan rasio dan memisahkan agama dari negara, sedangkan fundamentalis terperangkap dalam tekstualisme yang kaku dari era klasik. Solusinya Pemikiran Islam moderat digunakan sebagai jalan tengah untuk menggabungkan nilai-nilai tradisi dan modernitas.³³

Penelitian sebelumnya telah membahas moderasi politik Islam dan pemikiran Asy'ariyah secara terpisah. Namun, tidak banyak penelitian yang secara khusus membangun model jalan tengah politik yang didasarkan pada teologi

³²Siregar Miftahul Husna, “Politisasi Agama pada Kampanye Pemenangan Eramas dalam Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018,” *Jurnal Perspektif* 11, no. 1 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.4727>, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/4727>

³³Setiadi Ozi, “Peta Pemikiran Politik Islam: Liberal, Moderat, dan Fundamental,” *POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 1 (2019): 99–108, <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v2i1.5283>.

Asy'ariyah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada menemukan prinsip-prinsip politik Asy'ariyah yang dapat membentuk model jalan tengah tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam penyusunan serta pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka karya ilmiah ini disusun ke dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Penulis memaparkan pendahuluan, latar belakang, yang menjelaskan urgensi serta konteks kajian. Dalam bab ini juga dikemukakan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), serta metode penelitian.

BAB II: Bab ini menguraikan landasan teori yang meliputi pengertian, prinsip Teologi Asy'ariyah, serta model jalan tengah politik dalam konteks sosial politik Islam klasik.

BAB III: Bab ini berisi tentang metode penelitian

BAB IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian, berisi analisis mendalam tentang model jalan tengah politik dalam teologi Asy'ariyah

BAB V: Bab kelima adalah bab penutup. Ini mencakup jawaban atas pertanyaan penelitian saat ini dan gagasan untuk membangun paradigma baru yang berkaitan dengan topik ini.